

## PENDAHULUAN

Menurut Todaro, pembangunan berkaitan dengan berbagai macam aspek baik aspek ekonomi maupun non ekonomi. Pembangunan mampu merubah tatanan struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan perubahan kelembagaan pemerintah baik di daerah ataupun tingkat nasional. Pembangunan mampu dioptimalkan dengan syarat setiap *stakeholder* mampu berperan dalam proses pembangunan tersebut. Terlalu seringnya pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan setiap daerah baik skala nasional maupun internasional berlomba untuk meningkatkan pendapatan. Dengan adanya perbedaan sumber daya, maka sektor yang selalu diandalkan untuk menaikkan pendapatan adalah sumber daya alam daerah tersebut. Sehingga sering kali eksploitasi sumber daya terjadi, tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk masa yang akan datang dan kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi tersebut (Frisdiantara & Mukhlis, 2016).

Hal ini menginisiasi PBB untuk membuat program MDG`S (*Millenium Suistainable Development Goals*) dan SDG`S (*Suistainable Development Goals*) . Kebebasan otonomi daerah, memberikan wewenang pemerintah dalam penerapan SDG`s di daerahnya. Sesuai dengan tujuan SDG`s yakni untuk mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan, Kabupaten Kulon Progo yang dikenal sebagai Kabupaten termiskin kedua di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Gunung Kidul. Pemerintah Kulon Progo mengadapatasi tujuan SDG`s (1) mengentaskan kemiskinan, (3) kesehatan dan kesejahteraan untuk semua, (10) mengurangi ketimpangan. SDG`s tersebut diterapkan dalam program-program pengentasan kemiskinan antara lain, *One Village One Sister Company*(Satu desa satu dibina oleh perusahaan), KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun), Bela dan Beli Kulon Progo, *Universal Coverage*. Semua program tersebut ditujukan untuk mengurangi ketimpangan di daerah Kulon Progo (Ni`mah, et al., 2016).

Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk dapat memperoleh standar hidup yang layak. Menurut Hadiwigeno dan Pakphan (1993) penyebab kemiskinan bisa dilihat dari sudut keluarga, penduduk dan wilayah. Dari sudut keluarga, keluarga miskin memiliki ciri yang bisa dilihat dari pendapatan per kapita keluarga, status gizi, dan umur harapan hidup. Ciri-ciri tersebut sebagai akibat dari tingkat pendidikan, ketrampilan, jumlah anggota keluarga, nilai atau sikap, pekerjaan utama, modal kerja dan tingkat penggunaan input. Penyebab dari sudut wilayah adalah kondisi alam, sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, lembaga keuangan, jalan, dan sebagainya (Kasim, 2006).

Wilayah yang berbeda antar daerah menyebabkan setiap penanganan kemiskinan di satu daerah dengan daerah lain harus disesuaikan dengan faktor penyebab yang ada serta tidak bisa disamaratakan antar daerah. Karakteristik penanggulangan kemiskinan juga tidak bisa hanya dengan waktu yang singkat. Selain itu, diperlukannya integrasi antar sektor mengingat penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja akan tetapi faktor-faktor lain juga saling berpengaruh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan SDG'S dalam penegrtasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

## **METODE PENELITIAN**

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif kuantitatif. Analisis koding digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang merupakan data utama dalam penelitian ini. Data kualitatif di kumpulkan dengan wawancara SKPD terkait untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan SDG'S. Data kuantitatif digunakan untuk mendukung data kualitatif, dimana data kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda dengan meregresi data kuesioner yang diisi oleh Rumah Tangga Miskin. Sampel dalam penelitian dihitung dengan Metode Slovin dengan dengan persen

ketidaktelitian sebesar 6 % (0,06) dari jumlah populasi sebesar 18834 maka sampel yang terpilih adalah sebanyak 280 yang dipilih secara random.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tujuan SDG'S yang diterapkan di Kabupaten Kulon Progo, yang kemudian diterapkan dalam program pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program yang diterapkan pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah OVOC (*One Village One Sister Company*), UC (*Universal Coverage*), KAKB, Bela Beli Kulon Progo.

**Tabel 1.**

**Matriks Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan  
Kabupaten Kulon Progo**

	OVOC	Bela dan Beli KP	<i>Universal Coverage</i>	KAKB
<b>Faktor Pendukung</b>	Perda Kabupaten Kulon Progo No 22 Tahun 2012 dan Perbup Kabupaten Kulon Progo No 33 Tahun 2013	Surat Edaran Bupati No 025/2171	Perda Kab Kulon Progo No 6 Tahun 2009 Tentang JAMKESDA Perbup Kab Kulon Progo No 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem JAMKESDA	Keputusan Bupati No 49/A/2015 tertanggal 15 Januari 2015 mengenai Tim Pembinaan Pemberdayaan Keluarga di tingkat kabupaten, (2) Keputusan No 325 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK ) Kabupaten Kulon Progo, (3) Peraturan Bupati No 80 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan
			Komitmen Pemerintah daerah dan provinsi dalam menyediakan jaminan kesehatan	Anggaran APBD 2013
			Komitmen untuk menegakkan regulasi yang telah ditetapkan	Kader-kader yang peduli dengan KAKB

<b>Faktor Penghambat</b>	Keterbatasan dana	Belum optimalnya proses internalisasi dan spirit kepedulian serta kecintaan terhadap produk lokal	Penggalan potensi sumber pendanaan JAMKESDA yang belum optimal	Terbatasnya modal dan anggaran bantuan APBD /swasta yang belum memadai
	Kurangnya koordinasi anatar pemerintah dengan perusahaan	Pengusaha batik yang belum melebarkan sayap usahanya	Kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang jaminan kesehatan	Terbatasnya anggaran operasional
			Penerapan regeulasi yang belum optimal	Terbatasnya personil untuk membimbing, membina dan memonitoring KAKB
			Sistem pembayaran JAMKESDA yang belum mendukung sistem kendali mutu dan kendali baiaya	Terbatasnya kemampuan berwirausaha masyarakat
			Sistem pelayanan rujukan yang belum optimal	Mindset masyarakat yang masih <i>topdown</i>

<b>Strategi</b>	Pemerintah aktif untuk mengajak perusahaan yang mengikuti Forum TSP	Melakukan pendekatan formal maupun informal	Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan jaminan kesehatan	Mengadakan pelatihan
	Integrasi antar SKPD yang dijaga dan ditingkatkan	Peningkatan promosi secara langsung maupun tidak langsung	Meningkatkan sosialisasi dan mendorong untuk ikut berpartisipasi menjadi peserta Jaminana Kesehatan	Melaksanakan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien
		Mendorong terciptanya inovasi dan peningkatan mutu	Menyiapkan SDM yang berkompeten	Memberikan kebebasan masyarakat dalam memilih usahanya Misalnya: apabila barang yang dijual di Senkudaya (Sentral Kulakan Pos daya ) lebih mahal maka masyarakat boleh kulakan ditempat lain
			Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan linstas program	
			Menerapkan pelayanan yang sesuai dengan standar	
			Meningkatkan solidariats dan partisipasi menjadi pesert mandiri	

Sumber : Data Primer Diolah

## PENUTUP

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk bisa menambah sampel menjadi lebih banyak sehingga lebih bisa mempresentasikan populasi. Selain itu penambahan program yang diteliti sehingga dapat menjelaskan program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Frisdiantara, C., & Mukhlis, I. (2016). *Ekonomi Pembangunan : Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Deepublish.
- Kasim, M. (2006). *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya : Stud Kasus Padang Pariaman*. Jakarta: Indomedia.
- Ni`mah, S. K., Bahagijo , S., Santono, H., Primaldhi, A., Walandauw, P. C., Hendrastiti, T. K., & Sari, D. K. (2016). *Penurunan Ketimpangan Panduan Teknis Goal 10 SDGs Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah* . Retrieved from infid.org: [http://infid.org/wp-content/uploads/2016/09/BukuPanduanSDGsdanKetimpangan\\_Indo\\_rev.pdf](http://infid.org/wp-content/uploads/2016/09/BukuPanduanSDGsdanKetimpangan_Indo_rev.pdf)